



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN (audited)

Tahun Anggaran 2023



**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
KALIMANTAN SELATAN**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengelola Transfortasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelola Transfortasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan *akuntabel*.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengelola Transfortasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banjarmasin, Januari 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Provinsi Kalimantan Selatan



ZULMARDI, ATD, MM

NIP. 19680317 199103 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan Keuangan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	21
C. Penjelasan atas Pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos Laporan Operasional.....	36
E. Penjelasan atas Pos Laporan Perubahan Ekuitas	42



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

JL. A.Yani, KM. 17, Komp. Terminal Tipe A
Gambut Barakat, Kab. Banjar, Kalimantan
Selatan

Telp. (0511) 6776614

Fax.(0511) 6776614

Email : bptdkalsel@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan selaku UAKPA yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banjarmasin, Januari 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Provinsi Kalimantan Selatan



ZULMARDI, ATD, MM

NIP. 19680317 199103 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengelola Transfortasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar **Rp589.260.166**. Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp139.627.007.471** atau mencapai **95** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp149.320.980.000**.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran pada posisi 31 Desember 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PNBP	114.571.000	589.260.166	87.000.000	751.128.290
Belanja	145.988.339.000	139.627.007.471	78.614.942.000	78.332.449.671

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar **Rp324.324.633.915** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp18.571.581.102**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp281.527.453.604**; dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp24.225.599.209**. Nilai Ekuitas sebesar **Rp324.324.633.915**.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	18.571.581.102	9.811.724.462	8.759.856.640	89.28
Aset Tetap	281.527.453.604	243.545.897.896	37.981.555.708	15.60
Aset Lainnya	24.225.599.209	166.051.768	24.059.547.441	14.489.18
Jumlah Aset	324.324.633.915	253.523.674.126	70.800.959.789	27.93
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	15.303.823.734	0	15.303.823.734	0
Ekuitas				
Ekuitas	309.020.810.181	253.523.674.126	55.497.136.055	21.89
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	324.324.633.915	253.523.674.126	70.800.959.789	27.93

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp228.678.552** sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp62.723.034.028** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp(62.494.355.476)**. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp(6.910.398.488)** dan sebesar **Rp0** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp(69.404.753.964)**.

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Kegiatan Operasional				
Pendapatan Operasional	228.678.552	220.926.895	7.751.657	3.509
Beban Operasional	62.723.034.028	122.817.434.203	(60.094.400.175)	(48.93)
<i>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</i>	<i>(62.494.355.476)</i>	<i>(122.596.507.308)</i>	60.102.151.832	(49.02)

Kegiatan Non Operasional				
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(7.270.980.102)	(4.434.636.000)	(2.836.344.102)	63.59
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	360.581.614	250.001.395	110.580.219	44.232
<i>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</i>	<i>(6.910.398.488)</i>	<i>(4.184.634.605)</i>	<i>(2.725.763.883)</i>	65.137
Surplus (Defisit) – LO	(69.404.753.964)	(126.781.141.913)	57.376.387.949	(45.25)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp253.523.674.126** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp(69.404.753.964)** ditambah dengan koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas senilai **Rp(14.156.560.886)** dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp139.058.450.905** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp309.020.810.181**.

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Ekuitas Awal	253.523.674.126	307.487.857.465	(53.964.183.339)	-
Surplus (Defisit) – LO	(69.404.753.964)	(126.781.141.913)	57.376.387.949	-
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	0	0	0	-
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	(14.156.560.886)	(9.909.771.007)	(4.246.789.879)	-
Transaksi Antar Entitas	139.058.450.905	82.726.729.581	56.331.721.324	-
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	55.497.136.055	(53.964.183.339)	109.461.319.394	-
Ekuitas Akhir	309.020.810.181	253.523.674.126	55.497.136.055	-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)**

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023		%	31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi	REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	114.571.000	589.260.166	0	751.128.290
JUMLAH PENDAPATAN		114.571.000	589.260.166	0	751.128.290
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	6.476.914.000	6.476.164.434	99,99	4.541.658.936
Belanja Barang	B.4	54.011.843.000	53.712.352.892	99,45	17.968.511.221
Belanja Modal	B.5	85.499.573.000	79.438.490.145	92,91	55.822.279.514
JUMLAH BELANJA		145.988.330.000	139.627.007.471	95,64	78.332.449.671

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
KALIMANTAN SELATAN
NERACA

31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Persediaan	C.2	18.571.581.102	9.811.724.462
Jumlah Aset Lancar		18.571.581.102	9.811.724.462
ASET TETAP			
Tanah	C.3	20.825.089.680	20.825.089.680
Peralatan dan Mesin	C.4	127.785.127.725	124.337.854.595
Gedung dan Bangunan	C.5	182.522.468.721	158.306.304.150
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.6	7.374.334.800	7.374.334.800
Aset Tetap Lainnya	C.7	549.596.000	549.596.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.8	64.653.485.810	31.370.672.093
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(122.182.649.132)	(99.217.953.422)
Jumlah Aset Tetap		281.527.453.604	243.545.897.896
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.10	109.351.000	109.351.000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.11	24.168.377.209	-
Aset Lain-Lain	C.12	132.653.000	404.023.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.13	(184.782.000)	(347.322.232)
Jumlah Aset Lainnya		24.225.599.209	166.051.768
JUMLAH ASET		324.324.633.915	253.523.674.126
KEWAJIBAN			
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.14	15.303.823.734	-
Uang Muka dari KPPN	C.15	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		15.303.823.734	-
JUMLAH KEWAJIBAN		15.303.823.734	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.16	309.020.810.181	253.523.674.126
JUMLAH EKUITAS		309.020.810.181	253.523.674.126
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		324.324.633.915	253.523.674.126

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL

31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	228.678.552	220.926.895
JUMLAH PENDAPATAN		228.678.552	220.926.895
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6.476.164.434	4.541.658.936
Beban Persediaan	D.3	667.413.479	580.328.667
Beban Barang dan Jasa	D.4	30.808.945.516	13.287.536.620
Beban Pemeliharaan	D.5	1.779.110.960	1.072.632.782
Beban Perjalanan Dinas	D.6	4.311.151.559	3.062.311.143
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	4.839.510.500	85.067.511.717
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	13.840.737.580	15.205.454.338
JUMLAH BEBAN		62.723.034.028	122.817.434.203
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(62.494.355.476)	(122.596.507.308)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar		-	280.200.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		7.270.980.102	4.714.836.000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		360.581.614	250.001.395
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9	(6.910.398.488)	4.184.634.605
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(69.404.753.964)	126.781.141.913
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(69.404.753.964)	126.781.141.913

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
EKUITAS AWAL	E.1	253.523.674.126	307.487.857.465
Surplus/Defisit - LO	E.2	(69.404.753.964)	(126.781.141.913)
Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	E.3	(14.156.560.886)	(9.909.771.007)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	E.3.1	-	
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.2	-	
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.3	-	
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.4	-	
Selisih Revaluasi Aset	E.3.5	-	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.6	(26.614.246.832)	(10.376.131.017)
Koreksi Lain-Lain	E.3.7	-	
Transaksi Antar Entitas	E.4	139.058.450.905	82.726.729.581
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		55.497.136.055	(53.964.183.339)
EKUITAS AKHIR	E.5	309.020.810.181	253.523.674.126

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil, Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Transfortasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

Balai Pengelola Transfortasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan merupakan salah satu unit eselon II yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Balai Pengelola Transfortasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan pelayanan.

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengelola Transfortasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan. Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan data pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan aplikasi MonSAKTI yang digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keuangan.

SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. Laporan Keuangan Balai Pengelola Transfortasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Semester II Tahun 2023 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.3 Basis Akuntansi

Balai Pengelola Transfortasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengelola Transfortasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan,

dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengelola Transfortasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelola Transfortasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran

- a) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan – Laporan Operasional

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;

- o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- c) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a) Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 2) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - o Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - o Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- 6) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - o harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - o harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - o harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b) Aset Tetap

- 1) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - o Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- 4) Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai

penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- 5) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 6) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c) Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - o Tanah;
 - o Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - o Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang

dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

6)

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d) Piutang Jangka Panjang

- a) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e) Aset Lainnya

- a) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- b) Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau

jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- c) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- d) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i> Komputer	4 tahun
<i>Franchise</i>	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- e) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

f) Kewajiban

- a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

b) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

c) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

g) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENDAPATAN NEGARA

Realisasi Pendapatan Balai Pengelola Transfortasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp589.260.166**. Realisasi Pendapatan di lingkungan Balai Pengelola Transfortasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan, dihasilkan dari Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Jasa Perkapalan dan Kepelautan, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan serta Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan

sampai dengan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	
		Pendapatan	%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan dan Pemindahtanganan BMN			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	32.971.000	62.026.000	188,12
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika			
Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	78.000.000	128.000.000	164,10
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	3.600.000	30.320.000	842,22
Pendapatan Denda			
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	8.332.552	-
Pendapatan Lain-Lain			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	284	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	5.700.000	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	354.881.330	-
Jumlah	114.571.000	589.260.166	514,32

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 mengalami penurunan dibandingkan 31 Desember 2022.

B.2 BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan pada 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp139.627.007.471** atau **93 persen** dari anggaran belanja sebesar **Rp145.988.330.000**. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023			31 Desember 2022	
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Realisasi	% Naik (Turun)
Belanja Pegawai	6.476.914.000	6.476.164.434	100%	4.541.658.936	42,59
Belanja Barang	54.011.843.000	53.712.352.892	99%	17.968.511.221	198,92
Belanja Modal	85.499.573.000	79.438.490.145	93%	55.822.279.514	42,31
Jumlah	145.988.330.000	139.627.007.471	95,64	78.332.449.671	78,25

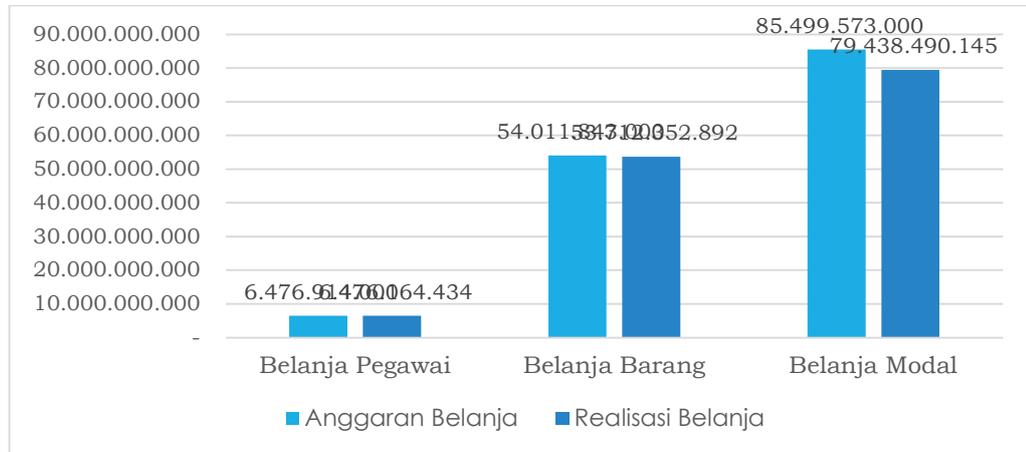
Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar **78.25 persen** dibandingkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022.

Komposisi pagu anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja

sampai dengan 31 Desember 2023

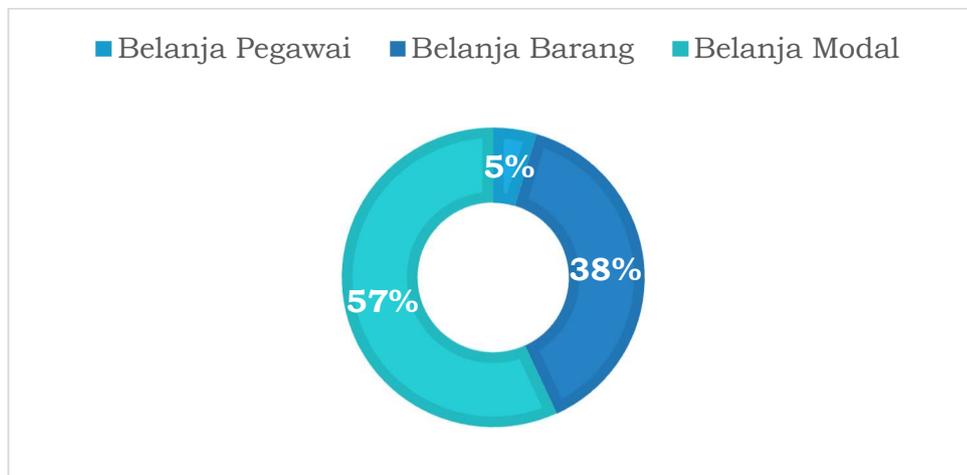
(dalam rupiah)



Komposisi Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja

sampai dengan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)



B.3 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp6.476.164.434** dan **Rp4.541.658.936**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun

barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dari 31 Desember 2022. Kenaikan belanja pegawai ini disebabkan oleh adanya kenaikan pangkat dari beberapa pegawai sehingga gaji dan tunjangan kinerja yang melekat mengalami kenaikan dan penambahan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan.

Rincian Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

*Realisasi Belanja Pegawai
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2023				% Realisasi Anggaran	31 Desember 2022	% Naik (Turun)
	Anggaran	Belanja	Pengembalian Belanja	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
BELANJA PEGAWAI							
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
Belanja Gaji Pokok PNS	2.199.086.000	2.159.437.360	-	2.159.437.360	98,20	1.614.704.160	33,74
Belanja Pembulatan Gaji PNS	42.000	37.650	1.581	36.069	85,88	26.084	44,34
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	95.158.000	93.833.152	-	93.833.152	98,61	93.677.724	0,17
Belanja Tunj. Anak PNS	31.502.000	28.443.818	-	28.443.818	90,29	28.245.537	0,70
Belanja Tunj. Struktural PNS	53.200.000	49.500.000	-	49.500.000	93,05	47.880.000	3,38
Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.375.000	3.375.000	180.008	3.194.992	94,67	3.150.000	1,43
Belanja Tunj. PPh PNS	19.616.000	1.889.513	-	1.889.513	9,63	1.929.323	(2,06)
Belanja Tunj. Beras PNS	132.473.000	113.554.560	-	113.554.560	85,72	95.739.240	18,61
Belanja Uang Makan PNS	432.396.000	401.431.000	-	401.431.000	92,84	257.771.000	55,73
Belanja Tunj. Umum PNS	151.356.000	135.710.000	555.000	135.155.000	89,30	92.255.000	46,50
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3.118.204.000	2.987.212.053	736.589	2.986.475.464	95,78	2.235.378.068	33,60
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
Belanja Gaji Pokok PPPK	37.500.000	28.763.600	-	28.763.600	76,70	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.000	136	-	136	1,36	-	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2.750.000	1.860.480	-	1.860.480	67,65	-	-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	750.000	186.048	-	186.048	24,81	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.700.000	2.500.000	-	2.500.000	92,59	-	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.540.000	1.738.080	-	1.738.080	68,43	-	-
Belanja Uang Makan PPPK	11.250.000	7.560.000	-	7.560.000	67,20	-	-
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	57.500.000	42.608.344	-	42.608.344	74,10	-	-
Belanja Lembur							
Belanja Uang Lembur	214.627.000	198.554.000	-	198.554.000	92,51	96.586.000	105,57
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	214.627.000	198.554.000	-	198.554.000	92,51	96.586.000	105,57
Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transit							
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	3.368.733.000	3.206.401.826	-	3.206.401.826	95,18	2.209.695.120	45,11
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PP	50.500.000	42.124.800	-	42.124.800	83,42	-	-
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	3.419.233.000	3.248.526.626	-	3.248.526.626	95,01	2.209.695.120	47,01
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	6.809.564.000	6.476.901.023	736.589	6.476.164.434	95,10	4.541.659.188	42,59

B.4 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp53.712.352.892** dan **Rp17.968.511.221**. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 karena meningkatnya kebutuhan operasional di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan. Rincian Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

*Realisasi Belanja Barang
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2023				% Realisasi Anggaran	31 Desember 2022	% Naik (Turun)
	Anggaran	Belanja	Pengembalian Belanja	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
BELANJA BARANG							
Belanja Barang Operasional	9.566.456.000	9.546.953.035	-	9.546.953.035	99,80	5.856.005.000	61,34
Belanja Barang Non Operasional	19.827.778.000	19.688.551.045	-	19.688.551.045	99,30	5.748.454.399	29,20
Belanja Barang Persediaan	494.401.000	481.094.655	-	481.094.655	26,99	492.982.637	102,47
Belanja Jasa	1.782.420.000	1.771.442.074	-	1.771.442.074	99,38	1.657.763.421	93,58
Belanja Pemeliharaan	2.049.457.000	1.973.148.924	-	1.973.148.924	96,28	1.150.994.621	58,33
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.349.665.000	4.311.151.559	-	4.311.151.559	99,11	3.062.311.143	71,03
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	15.941.666.000	15.940.011.600	-	15.940.011.600	99,99	-	-
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	54.011.843.000	53.712.352.892	-	53.712.352.892	99,45	17.968.511.221	33,45

Uraian	Uraian	31 Desember 2023		% Realisasi Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
a	b	c	d	e
52	BELANJA BARANG			
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

Realisasi Belanja Barang dalam rangka penanganan dan penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan sebesar **Rp0**.

B.5 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp79.438.490.145** dan **Rp55.822.279.514** Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dari Realisasi Belanja Modal 31 desember 2022.

*Realisasi Belanja Modal
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2023		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2022	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.397.101.000	16.308.263.498	99,46	12.996.443.487	25,48
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.102.472.000	63.130.226.647	91,36	40.469.426.727	55,99
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	2.356.409.300	(100,00)
Jumlah	85.499.573.000	79.438.490.145	92,91	55.822.279.514	42,31

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing **Rp9.370.243.948** dan **Rp6.541.938.711**. Belanja modal peralatan dan mesin merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Uraian	30 September 2023		% Realisasi Anggaran	30 September 2022	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.999.718.000	9.370.243.948	93,71	6.541.938.711	43
Jumlah	9.999.718.000	9.370.243.948	93,71	6.541.938.711	43

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.370.243.948 diantaranya berupa:

1. Pengadaan Kontainer senilai Rp 148.697.438 di Lingkungan BPTD Kelas II Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Pengadaan Meja Kerja Kayu di Lingkungan BPTD Kelas II Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp 35.000.000;
3. Pengadaan Meja Resepsionis senilai Rp 45.000.000 di Lingkungan BPTD Kelas II Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya senilai Rp 25.000.000 di Lingkungan BPTD Kelas II Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Pengadaan Printer (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp 17.000.000 di Lingkungan BPTD Kelas II Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Pengadaan Sepeda Motor senilai Rp 112.059.000 di Lingkungan BPTD Kelas II Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Pengadaan Sepeda Motor Listrik senilai Rp 20.000.000 di Lingkungan BPTD Kelas II Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Pengadaan Lemari Kayu senilai Rp 10.000.000 di Lingkungan BPTD Kelas II Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Pengadaan P.C Unit senilai Rp 25.000.000 di Lingkungan BPTD Kelas II Provinsi Kalimantan Selatan;
10. Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin dalam Pengerjaan senilai Rp 7.115.913.935 di Lingkungan BPTD Kelas II Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya senilai Rp 235.904.093 di Lingkungan BPTD Kelas II Provinsi Kalimantan Selatan.

B.5.2. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar **Rp63.130.226.647** dan **Rp40.469.426.727**.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2022	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN					
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	69.102.472.000	63.130.226.647	91,36	40.469.426.727	56
Jumlah	69.102.472.000	63.130.226.647	91,36	40.469.426.727	56

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar **Rp63.130.226.647** berupa Penyelesaian Pembangunan dengan KDP Pembangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/bandara permanen dan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan Pembangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/bandara permanen di Lingkungan BPTD Kelas II Provinsi Kalimantan Selatan.

C. PENJELASAN ATAS POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp18.571.581.102** dan **Rp9.811.724.462**. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan yang signifikan, terdiri atas barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional (Barang Konsumsi dan Bahan untuk Pemeliharaan).

Rincian Persediaan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Jumlah	%
Barang Konsumsi	307.720.102	300.000.962	7.719.140	2,57
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	14.939.474.300	9.511.723.500	5.427.750.800	57,06
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	3.324.386.700	-	3.324.386.700	-
Jumlah	18.571.581.102	9.811.724.462	8.759.856.640	89,28

C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp20.825.089.680** dan **Rp20.825.089.680**.

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 tidak terdapat transaksi mutasi tambah atau mutasi kurang sehingga saldo akhir Tanah per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan dari saldo 31 Desember 2022.

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp127.785.127.725** dan **Rp124.337.854.595**. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Peralatan dan Mesin
a	B	c
100	<i>Saldo Awal</i>	9.519.588.390
101	<i>Pembelian</i>	457.756.438
102	<i>Transfer Masuk</i>	23.004.000
115	<i>Reklasifikasi Masuk Dari Persediaan</i>	251.545.500
105	<i>Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP</i>	15.429.441.153
402	<i>Penggunaan Kembali BMN</i>	271.370.000
112	<i>Perolehan Lainnya</i>	12.863.110.446
305	<i>Koreksi Pencatatan</i>	(10.594.925.111)
264	<i>Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang</i>	(1.041.421.382)
303	<i>Hibah Keluar</i>	(6.893.091.856)
315	<i>Reklasifikasi Keluar Ke Persediaan</i>	(21.758.400)
369	<i>Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra</i>	(57.759.845)
	Jumlah	20.206.859.333

Mutasi Tambah:

1. Pembelian terdiri dari Kontainer, Meja Kerja Kayu, Meja Resepsionis, Alat Rumah Tangga Lainnya dan Printer, Sepeda Motor, Sepeda Motor Listrik, P.C Unit, senilai Rp457.756.438;
2. Transfer Masuk terdiri dari Alat Ukur Lainnya senilai Rp23.004.000;
3. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP terdiri dari Rambu-rambu Lalu Lintas Darat Lainnya, Rambu Tidak Bersuar Lainnya, Pagar Jalan dan Taman, Paku Jalan, Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun, Rambu Jalan, Rambu Bersuar Lainnya, Alat Traffic Control and Monitoring senilai Rp15.429.441.153;
4. Perolehan Lainnya terdiri dari Alat Traffic Control and Monitoring, Rambu Bersuar Lainnya, Rambu Jalan, Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun, Guardrail, Rambu Tidak Bersuar Lainnya, dan Rambu-rambu Lalu Lintas Lainnya dan Rambu-rambu Lalu Lintas Laut senilai Rp12.863.110.446;

5. Reklasifikasi Masuk dari persediaan berupa Rambu Bersuar Lainnya sebesar Rp251.545.500;
6. Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif berupa speed Boat/Motor Tempel senilai Rp 271.370.000.

Mutasi Kurang:

1. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang berupa Alat Traffic Control and Monitoring, Rambu-rambu Lalu Lintas Laut sebesar Rp(1.041.421.382);
2. Hibah Keluar berupa Speed Boat / Motor Tempel sebesar (Rp568.535.000);
3. Koreksi Pencatatan pada Alat Kalibrasi Lainnya, Alat Penguji Kendaraan Bermotor Lainnya, Rambu Bersuar Lainnya, Guardrail, Dan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya, Alat Traffic Control and Monitoring, Rambu-rambu Lalu Lintas Laut, Pagar Jalan dan Taman, Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun, Rambu Jalan, dan Rambu Tidak Bersuar Lainnya sebesar Rp(27.354.511.314).
4. Reklasifikasi Keluar ke Persediaan berupa Rambu Jalan senilai Rp(21.758.400);
5. Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra berupa Rambu Tidak Bersuar Lainnya sebesar Rp(57.759.845).
6. Reklasifikasi Keluar ke persediaan berupa Rambu Jalan senilai Rp(21.758.400).

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp182.522.468.721** dan **Rp158.306.304.150**.

Mutasi Tambah:

1. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP terdiri dari Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen dan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Lainnya senilai Rp21.476.131.290;

2. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Terdiri dari Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen dan Pagar Permanen senilai Rp53.483.674.961.

Mutasi Kurang:

1. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang pada Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen senilai (Rp343.767.796);
2. Koreksi Pencatatan berupa Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen, Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen Lainnya dan Pagar Permanen senilai (Rp50.274.123.094);
3. Reklasifikasi Keluar ke Persediaan berupa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen senilai (Rp125.750.790)

C.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp7.374.334.800** dan **Rp7.374.334.800**.

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 tidak terdapat transaksi mutasi tambah atau mutasi kurang sehingga saldo akhir Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan dari saldo 31 Desember 2022.

C.7 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah **Rp549.596.000** dan **Rp549.596.000**. Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 tidak terdapat transaksi mutasi tambah atau mutasi kurang sehingga saldo akhir Aset Tetap

Lainnya per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan dari saldo 31 Desember 2022.

C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp64.653.485.810** dan **Rp31.370.672.093**.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Barang	Tgl Perolehan	Nilai Kontrak	Nilai KDP	Ket
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	18/11/2022	27.974.520.925	5.503.855.725	RPATA
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	30/11/2022	1.190.212.075	1.400.249.500	RPATA
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	20/12/2022	27.974.520.925	4.475.918.850	RPATA
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	10/11/2023	13.779.699.900	12.745.467.308	RPATA kesempatan penyelesaian pekerjaan lewat tahun anggaran dengan skema denda
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	06/04/2023	826.751.000	537.388.150	RPATA
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	06/04/2023	770.064.000	500.541.600	RPATA
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	10/04/2023	15.244.864.900	5.955.778.540	RPATA kesempatan penyelesaian pekerjaan lewat tahun anggaran dengan skema denda
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	06/06/2023	15.244.864.900	2.859.416.420	RPATA kesempatan penyelesaian pekerjaan lewat tahun anggaran dengan skema denda
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	21/07/2023	15.244.864.900	2.859.416.420	RPATA kesempatan penyelesaian pekerjaan lewat tahun anggaran dengan skema denda
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	20/11/2023	27.974.520.925	22.156.224.000	RPATA
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	31/08/2023	27.974.520.925	2.315.115.450	RPATA
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	28/12/2023	3.252.145.320	3.252.145.320	RPATA
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	28/12/2023	91.968.527	91.968.527	RPATA
		177.543.519.222	64.653.485.810	

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing **Rp(122.182.649.132)** dan **Rp(99.217.953.422)**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4	5
1	Tanah	20.825.089.680	-	20.825.089.680
2	Peralatan dan Mesin	127.785.127.725	87.444.047.541	40.341.080.184
3	Gedung dan Bangunan	182.522.468.721	31.664.984.326	150.857.484.395
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.374.334.800	3.073.617.265	4.300.717.535
5	Aset Tetap Lainnya	549.596.000	-	549.596.000
	Total	339.056.616.926	122.182.649.132	216.873.967.794

C.10 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp109.351.000** dan **Rp109.351.000**. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET TAK BERWUJUD				
<i>Software</i>	59.576.000	59.576.000	-	-
Hasil Kajian/Penelitian	49.775.000	49.775.000	-	-
Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	109.351.000	109.351.000	-	-

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 tidak terdapat transaksi mutasi tambah atau mutasi kurang sehingga saldo akhir Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan dari saldo 31 Desember 2022.

C.11 Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Nilai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan adalah ATB yang pengerjaannya melebihi dan/atau melewati 1 (satu) periode tahun anggaran, sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

C.12 Aset Lain-Lain

Nilai Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah **Rp132.653.000** dan **Rp404.023.000**. Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Rincian Aset Lain-Lain
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Jumlah	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
ASET LAIN-LAIN				
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	132.653.000	404.023.000	(271.370.000)	(67,17)
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	-	-	-	-
Jumlah	132.653.000	404.023.000	(271.370.000)	(67,17)

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah per 31 Desember 2023 tidak terdapat transaksi mutasi tambah atau mutasi kurang sehingga saldo akhir Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan dari saldo 31 Desember 2022.

C.13 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berupa dana pekerjaan kontraktual yang dimasukkan ke Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran Kementerian Keuangan RI per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah **Rp24.168.377.209** dan **Rp0,00**.

C.14 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp(184.782.000)** dan **Rp(347.322.232)**.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya
per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4	5
1	Aset Tak Berwujud	109.351.000	132.653.000	- 23.302.000
2	Aset Lain-Lain	132.653.000	52.129.000	80.524.000
Total		242.004.000	184.782.000	57.222.000

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.15 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp15.303.823.734** dan **Rp0,00**. Rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA				
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	0	-	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	0	-	0
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	0	-	0
Pengeluaran transitio yang masih harus dibayar	-	0	-	0
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	15.303.823.734	0	15.303.823.734	0
Jumlah	15.303.823.734	-	15.303.823.734	0

C.16 Utang yang Belum Ditagihkan

Saldo Utang yang belum ditagihkan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

C.17 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.18 Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp309.020.810.181** dan **Rp253.523.674.126**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Balai Pengelola Transfortasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 desember 2022 adalah sebesar **Rp228.678.552** dan **Rp220.926.895**. Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar **3.88 persen** dibandingkan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2022. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP

31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	30 September 2023	30 September 2022	% Naik (Turun)
Pendapatan Operasional			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	228.678.552	220.926.895	3,51
Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan BMN	228.678.552	220.926.895	3,51

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan 31 Desember 2023 dan 31 desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp6.476.164.434** dan **Rp4.541.658.936**. Belanja tersebut terdiri dari:

*Perbandingan Rincian Beban Pegawai
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	2.159.437.360	1.614.704.160	0,34
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	36.069	25.832	0,40
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	93.833.152	93.677.724	0,00
Beban Tunj. Anak PNS	28.443.818	28.245.537	0,01
Beban Tunj. Struktural PNS	49.500.000	47.880.000	0,03
Beban Tunj. Fungsional PNS	3.194.992	3.150.000	0,01
Beban Tunj. PPh PNS	1.889.513	1.929.323	(0,02)
Beban Tunj. Beras PNS	113.554.560	95.739.240	0,19
Beban Uang Makan PNS	401.431.000	257.771.000	0,56
Beban Uang Lembur	198.554.000	96.586.000	1,06
Beban Tunjangan Umum PNS	135.155.000	92.255.000	0,47
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3.206.401.826	2.209.695.120	0,45
Beban Gaji Pokok PPPK	28.763.600	-	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	136	-	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.860.480	-	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	186.048	-	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2.500.000	-	-
Beban Tunjangan Beras PPPK	1.738.080	-	-
Beban Uang Makan PPPK	7.560.000	-	-
Beban PegawaiTunjanganKhusus/Kegiatan/Kinerj a PPPK	42.124.800	-	-
Jumlah	6.420.194.890	4.541.658.936	0,41

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp667.413.479** dan **Rp580.328.667**.

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan
31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	660.957.479	579.394.567	14,08
Beban Persediaan Bahan Baku	5.706.000	865.600	559,20
Beban Persediaan Lainnya	750.000	68.500	994,89
Jumlah	667.413.479	580.328.667	15,01

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp30.808.945.516** dan **Rp13.287.536.620**. Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar **131.863 persen** dibandingkan dengan 31 desember 2022.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	4.841.455.512	4.639.479.159	4
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	257.880.000	335.640.000	- 23
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	399.683.500	534.739.500	- 25
Beban Honor Output Kegiatan	4.342.260.000	2.782.870.000	56
Beban Barang Non Operasional Lainnya	15.157.102.045	2.367.096.287	540
Beban Barang Operasional Lainnya	3.849.831.635	345.163.591	1.015
Beban Bahan	189.189.000	310.343.502	- 39
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	515.086.816	409.977.638	26
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	101.750	982.750	- 90
Beban Sewa	1.064.800.850	1.080.900.000	- 1
Beban Langganan Listrik	93.966.256	78.617.749	20
Beban Langganan Telepon	88.224.152	87.557.454	1
Beban Langganan Air	9.364.000	710.580	1.218
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	34.813.800	- 100
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	278.644.610	- 100
Jumlah	30.808.945.516	13.287.536.620	131,86

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp1.779.110.960** dan **Rp1.072.632.782**.

Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	421.009.400	301.756.000	39,52
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.286.192.295	709.404.400	81,31
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3.572.600	5.360.019	(33,35)
Beban Persediaan suku cadang	68.336.665	46.130.621	48,14
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	9.981.742	
Jumlah	1.779.110.960	1.072.632.782	65,86

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp4.311.151.559** dan **Rp3.062.311.143**.

Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	4.195.151.559	3.026.435.143	38,62
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35.000.000	35.876.000	(2,44)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	61.000.000	-	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000	-	(100,00)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	-	-
Jumlah	4.311.151.559	3.062.311.143	40,78

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp13.840.737.580** dan **Rp15.205.454.338**.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	9.524.618.681	11.380.007.869	(16,30)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.930.609.392	3.147.953.425	24,86
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	336.752.993	589.376.415	(42,86)
Beban Penyusutan Jaringan	15.075.360	15.075.360	-
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	18.787.154	58.147.269	(67,69)
Beban Amortisasi Software	14.894.000	14.894.000	-
Jumlah	13.840.737.580	15.205.454.338	(8,98)

D.8 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik (Turun)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	280.200.000	(100,00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	7.270.980.102	4.714.836.000	54,21
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	360.581.614	250.001.395	44,23
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(6.910.398.488)	(4.184.634.605)	65,14

E. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp253.523.674.126** dan **Rp307.487.857.465**.

E.2 SURPLUS (DEFISIT) – LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **(Rp69.404.753.964)** dan **(Rp126.781.141.913)**. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH (MENGURANGI) EKUITAS

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar **Rp0,00**.

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

E.3.6 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp(14.156.560.886)** dan **Rp(9.909.771.007)**.

E.3.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp309.020.810.181** dan **Rp253.523.674.126**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	- 139.627.007.471
Diterima dari Entitas Lain	589.260.166
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	- 20.703.600
Jumlah	(139.058.450.905)

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal Kementerian/Lembaga, antar Kementerian/Lembaga, maupun Kementerian/Lembaga dengan Bendahara Umum Negara (BUN). Transaksi antar Entitas terdiri dari:

3. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja yang melibatkan Kas Negara (BUN);
4. Transaksi Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN;
5. Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan, pengesahan pengembalian hibah langsung dan pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu dalam bentuk kas, barang, maupun jasa/surat berharga.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar **Rp589.260.166** sedangkan DKEL sebesar **Rp(139.627.007.471)**.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp(20.703.600)** Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp0**.

E.5 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp309.020.810.181** dan **Rp253.523.674.126**.